



ISSN 1979-8867

DHARMA PRAJA

JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN

Volume 12 Nomor 1, Juni 2019

1. **MENBANGUN SINERGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENUJU BIROKRASI BERKUALITAS DI ERA TRUHN 2024**
Erlina Hanani
2. **MINIBER PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA: KAJIAN PEMBANGUNAN DI DESA SIDDHIKUN DAN LUBUK BUMBUN KABUPATEN NANGGI DAIRI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI**
M. Iwan Tahir, Yosi Retnalisa Dwi Santri
3. **PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN SEBAGAI MITRA KERJA LURAH DI KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Anwar Rosshad, Diki Dewantara
4. **UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN LEWAT INOVASI JEMPUT BOLA: KAJIAN DESKRIPSI BADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**
Yayat Sudrajat, Dara Arleta Bari
5. **DESKRIPSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA GAPURA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**
Heru Sulistiyo
6. **STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI DI RITA BALIKAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Kartwi, Imamujahid Imanullah Al Amin
7. **KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**
Raden Wijaya
8. **EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATAN KINERJA AUDITOR DI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR**
Ely Sukmana, Muhammad Ardiansyah Az Zhaahir
9. **PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI DANA DESA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**
Tri Ivatul Fitriani, Sulaiman
10. **ANALYSIS OF ACCURACY THE TAX OBJECT SALES VALUE (NJOP) TO MARKET VALUE WITH ASSESSMENT SALES RATIO METHOD (CASE STUDY IN MALANG CITY)**
Rendra Kurnia Wardana



FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

ISSN 1979-8857

JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

Volume 12, No. 1, Juni 2019

SUSUNAN REDAKSI

Pembina

Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si

Penanggung Jawab

Dr. Muhadam Labolo, M.Si

Wakil Penanggung Jawab

Dra. Meltarini, M.Si

Taslim, SSTP, M.Si

Redaktur

Heru Rochmansjah, Sh, M.Si

Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

Drs. Teha Sugiyo, M.Pd

Penyunting/Editor

Annisa Rahmadanita, S.IP, M.Tr.IP

Vinda Verina Kartika DP, S.STP, M.Tr.IP

Mitra Bestari

Dr. Mada Sukmajati, MPP.

Dr. H. Ondo Riyani, Drs., M.Si

Desain Grafis

Ardika Nurfurkon, S.STP

Sekretariat

Ketua

Amrin. S.STP, M.Si

Anggota

Kodir Siregar, SE, MM

Sudaryana, S.IP

Astri Malati Sukma, S.STP

M. Sopiyan, SE

Riyan Jaelani, S.STP, M.Tr.IP

Endang Sanuji, S.Pd.I

Kartiwi, S.Sos

Gugun Gumanti, S.IP

PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN SEBAGAI MITRA KERJA LURAH DI KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Anwar Rosshad¹, Diki Dewantara²

¹⁾ Institut Pemerintahan Dalam Negeri
rosshad_66@yahoo.com

²⁾ Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

ABSTRACT

The Role of Village Community Institutions as Village Work Partners in Pagesangan Sub-District, Mataram District, Mataram City, West Nusa Tenggara Province. Decentralization has caused some central government affairs to be delegated to regional government affairs. One of them is basic and social services. The purpose of this study is to describe the role of Village Community Institutions as working partners of headman in Pagesangan Sub-District, Mataram Subdistrict, in basic services to the community and in the social field in the Village. The research method used is an explorative method with an inductive approach that aims to obtain information about the current situation by looking at the links between the variables that exist. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Data analysis is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study illustrate the role of the Pagesangan Village community institution as a working partner of the village head both in the field of service and social affairs, although there are still obstacles. Suggestions given to Pagesangan Village and village community institutions are to make further technical implementation guidelines on the role of village social institutions, improve work motivation, improve socialization and service quality, and increase community independence and role in social services and activities in the Village Pagesangan.

Keywords: basic services, social community, Pagesangan, Mataram

ABSTRAK

Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai Mitra Kerja Lurah di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desentralisasi menyebabkan beberapa urusan pemerintah Pusat dilimpahkan menjadi urusan pemerintah daerah. Salah satunya pelayanan dasar dan sosial kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja Lurah di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, dalam pelayanan dasar kepada masyarakat dan dalam bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat kaitan antarvariabel yang ada. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menggambarkan peranan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pagesangan sebagai mitra kerja lurah baik dalam bidang pelayanan dan sosial kemasyarakatan sudah cukup baik walaupun masih ada hambatan yang dihadapi. Saran yang diberikan kepada Kelurahan Pagesangan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah dengan membuat pedoman pelaksanaan teknis lebih lanjut tentang peran lembaga kemasyarakatan kelurahan, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan sosialisasi dan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kemandirian dan peran masyarakat dalam pelayanan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Pagesangan.

Kata kunci: pelayanan dasar, sosial kemasyarakatan, Pagesangan, Mataram.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Apabila masyarakat kuat dalam hal kewenangannya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan akan membawa dampak yang positif baik dari sisi masyarakat maupun negara. Suatu perencanaan akan tepat mengenai sasaran dan terlaksana dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat apabila perencanaan dibuat bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa dilibatkan sehingga masyarakat merasa ikut memiliki, lalu muncul partisipasi dan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan.

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981: 154 – 155) yang mengemukakan 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting. Alasannya:

1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
- 3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yang dimaksud masyarakat adalah sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Masyarakat dengan segala dimensinya menjadi salah satu komponen yang tidak dapat ditinggalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa dan

negara. Kumpulan manusia ini perlu dikelola agar masing-masing individu menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan.

Kemajemukan masyarakat perlu terangkum pada satu wadah. Wadah tersebut diharapkan dapat menampung aspirasi masing-masing individu tersebut. Dalam hal ini, masyarakat berkolerasi pula dengan pemerintah dan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan, yang dimaksud dengan Lurah atau Kepala Kelurahan merupakan fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan, dan pemerintahan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dapat disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan meliputi RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dan melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan, perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, perlu diupayakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dibentuklah Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Lembaga Kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan

bersama. Lembaga kemasyarakatan harus mempointasi sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan mitra kerja bagi lurah dan perangkatnya guna memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Tugas pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tugas itu dicapai melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta lembaga masyarakat. Peran serta lembaga dalam masyarakat termasuk pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Masyarakat Pasal 3 berbunyi "Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat."

Menurut Perda Kota Mataram No 3 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 1 Ayat (7) yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Kelurahan sebagai tataran pemerintahan yang paling bawah, memiliki peran aktif dalam pelayanan masyarakat.

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah:

- 1) Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,; dan
- 3) Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sangat diperlukan guna membantu peran lurah dalam melaksanakan tugasnya baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat kelurahan maupun pembangunan dan masalah sosial kemasyarakatan, khususnya

Kelurahan Pagesangan. Peraturan Daerah yang menyangkut dan mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pun sudah ada dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 03 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Tabel 1
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk (jiwa)	LKK	Klasifikasi
1	Pagesangan Selatan	919	Lengkap	Swadaya
2	Pagesangan Utara	885	Lengkap	Swadaya
3	Pagesangan Timur	662	Belum Lengkap	Swadaya
4	Pagesangan Barat	793	Belum Lengkap	Swadaya
5	Pagesangan Indah	1.512	Lengkap	Swakarsa
6	Pagesangan Baru	1.913	Lengkap	Swakarsa
7	Bebidas	1.559	Belum Lengkap	Swadaya
Jumlah		8.243		

Sumber: Data penduduk Kelurahan Pagesangan tahun 2015

Kelurahan Pagesangan dengan jumlah penduduk 8.243 Jiwa yang tersebar pada 7 Lingkungan Kelurahan tentunya mempunyai berbagai permasalahan yang dihadapi seperti kesenjangan pada penyiapan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelayanan-pelayanan sosial masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai yang terdapat pada Kelurahan baik sarana pelayanan dasar maupun yang lainnya.

Kelurahan Pagesangan merupakan kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pegawai, baik swasta maupun negeri. Masyarakatnya sangat memperhatikan tingkat pendidikan, dan kesejahteraan yang membuat kualitas Sumber Daya Manusia yang dihasilkan sudah cukup berkualitas. Namun dengan latar belakang pekerjaan inilah yang malah berdampak bagi kurang optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, karena kesibukan masing-masing individu dalam kehidupan sehari-hari, ditambah lagi sikap individualisme perkotaan yang menambah buruk peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tengah masyarakat.

Kurang optimalnya partisipasi serta peran dan sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam tugasnya sebagai mitra kerja Kelurahan Pagesangan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersama. Pembentukan LKK memiliki tugas dan peran yang harus dilaksanakan yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersinergi dengan lurah sebagai mitra guna memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan fokus permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?; 2) Bagaimana peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pagesangan dalam sosial kemasyarakatan?; 3) Bagaimana hubungan mitra kerja yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan?; 4) Apa saja hambatan-hambatan yang menjadi penghalang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan menjalankan fungsi dan perannya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Menurut Wikipedia, penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian.

Metode ini diterapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat kaitan antarvariabel yang ada. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dalam Bidang Pelayanan Dasar

Lembaga Kemasyarakatan menurut Fitcher adalah "Suatu sistem hubungan sosial yang mengandung nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok masyarakat". Lebih jauh Soerjono Soekanto dan Koentjaraningrat

juga memberikan pandangannya tentang lembaga kemasyarakatan yaitu "himpunan norma dan sistem tata kelakuan yang berkisar kepada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kompleks dalam kehidupan masyarakat".

Kenyataan yang ada di lapangan hal ini sejalan dengan yang penulis dapatkan. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan suatu sistem hubungan sosial di tingkat Kelurahan yang saling terkait dan bekerjasama antara lembaga satu dan lembaga yang lainnya dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yaitu pelayanan dasar kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas diperoleh pengertian bahwa dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut, baik lembaga kemasyarakatan Kelurahan maupun masyarakat, harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Pagesangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan harus melalui prosedur-prosedur seperti contoh dalam hal pemberian surat-surat keterangan dan administrasi. Masyarakat harus melalui tahap-tahap tertentu maupun melengkapi dokumen-dokumen tertentu agar dapat dilayani oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan yang dibutuhkan tersebut dapat tercapai.

Analisis Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan

Menurut Soerjono Soekanto, lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan kepada anggota komunitas, bagaimana mereka

harus bersikap atau bertindak dalam menangani masalah yang timbul atau berkembang di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan hubungan.

- 2) Menjaga integritas masyarakat yang bersangkutan
- 3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan sistem kontrol sosial, anggota sistem pengawasan publik.

Hal ini sejalan dengan yang penulis dapatkan di lapangan. Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dalam bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan yaitu memberikan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan kepada masyarakat bagaimana cara harus bersikap dan bertindak. Hal ini berkaitan dengan masalah keagamaan dan sosial dan kebudayaan yang ada di Kelurahan. Bagaimana masyarakat dapat bersikap sesuai dengan norma-norma agama dan norma sosial yang ada di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan cenderung mengedepankan sikap kepedulian sosial, melestarikan kehidupan-kehidupan adat dan budaya yang ada di masyarakat. Kehidupan sosial budaya dapat terus dilestarikan dari generasi ke generasi khususnya oleh generasi muda. Memberikan bimbingan kepada masyarakat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan pemberdayaan yang diberikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan kepada masyarakat agar masyarakat dan generasi muda lebih produktif. Melakukan perannya sebagai kontrol sosial dan pengawasan publik kepada masyarakat, sehingga Kelurahan Pagesangan menjadi aman, tertib dan nyaman.

Hubungan Mitra Kerja dan Koordinasi

Menurut Notoatmodjo bahwa “Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.” Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan juga suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum. Menurut Promkes Depkes RI, meliputi:

- 1) Mitra kerja mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner”.
- 2) Proses pencarian/ perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
- 3) Upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.
- 4) Suatu kesepakatan kerja sama di mana seseorang, kelompok atau organisasi bekerja sama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan. (Ditjen P2L & PM, 2004)

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dengan pihak Kelurahan Pagesangan dapat dikatakan telah melakukan proses mitra kerja antara satu sama lain dengan melakukan interaksi dan interelasi di antara keduanya. Hubungan kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah Pagesangan adalah bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan mendidik. Hal tersebut juga dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dapat terlaksananya visi dan misi Kelurahan Pagesangan secara baik dan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Hubungan kerja sama, kemitraan dan koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dengan Lurah Pagesangan melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah organisasi masyarakat di Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang diakui dan ditetapkan oleh Lurah. Walaupun Lembaga Kemasyarakatan bukan pekerjaan yang utama tetapi lembaga ini sangat penting peranannya dalam masyarakat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di Kelurahan khususnya di Kelurahan Pagesangan. Namun dalam menjalankan fungsi dan perannya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut sering kali menemui hambatan dan

rintangan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan kelurahan sering kali dirasa kurang maksimal dan kurang optimal.

Hambatan-hambatan tersebut di antaranya:

- 1) Sumber daya dan sumber dana yang kurang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sehingga seringkali masyarakat harus menggunakan swadaya masyarakat sendiri dalam melakukan kegiatan.
- 2) Informasi dan komunikasi yang kurang terjalin antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan masyarakat. Baik penyampaian informasi dari kelurahan kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada Kelurahan.
- 3) Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi serta peran antara Lembaga Kemasyarakatan yang satu dan Lembaga Kemasyarakatan yang lainnya.
- 4) Sikap individualisme masyarakat yang tinggi. Kelurahan Pagesangan seperti yang kita ketahui merupakan kelurahan yang terletak di tengah-tengah Kota Mataram dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Masyarakatnya yang bersifat heterogen menyebabkan munculnya sikap individualisme masyarakat perkotaan. Ditambah dengan kesibukan masyarakat perkotaan menyebabkan sikap sosial kemasyarakatan di Kelurahan Pagesangan semakin menurun.
- 5) Pengetahuan dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tentang

tugas dan fungsinya yang masih kurang, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di Kelurahan sering kali lembaga kemasyarakatan kelurahan bingung dengan apa yang akan dan harus mereka kerjakan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Kelurahan Pagesangan dan atas analisis serta informasi yang terkumpul, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik. Pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan terdiri dari berbagai macam bentuk pelayanan. Hal ini dikarenakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanannya pun berbeda-beda.
- 2) Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan dalam sosial kemasyarakatan sudah cukup baik. Peranan tersebut berupa keikutsertaan anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam kegiatan sosial masyarakat di Kelurahan, kegiatan keagamaan, kegiatan adat istiadat serta peran dalam meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat.
- 3) Hubungan mitra kerja yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan bersifat konsultatif dan koordinatif, baik dengan pihak Kelurahan Pagesangan

maupun kerja sama dengan pihak lain.

- 4) Hambatan-hambatan yang menjadi penghalang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pagesangan menjalankan fungsi dan perannya yaitu di antaranya sumber dana yang diberikan pemerintah terkadang kurang; informasi dan komunikasi yang kurang terjalin kepada masyarakat; adanya dualisme fungsi antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; pemahaman akan tugas dan fungsi dari pengurus lembaga kemasyarakatan yang masih kurang serta sikap individualisme kelurahan yang masih cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kompas.
- Bernadus Luankali. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Cresswell, John. W. 2014. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchlis, Hamdi. 200. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute, Jakarta.
- Nasution, S. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oei, Istijanto. 2010. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pusatka Utama.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, M. Elly, Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Silalahi, Ulber dan Wirman Syafri. 2015. *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik*, Sumedang: IPDN Press.
- Sugiono, 2012. (cet-17). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Haryono. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globali*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan
- Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 3 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.